

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan wilayah di negara-negara berkembang umumnya ditandai oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi setiap tahunnya. Kondisi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan laju urbanisasi yang tidak terkendali. Peningkatan kebutuhan terhadap lahan memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan permukiman yang tidak terarah. (Melsha et al., 2025) Pertambahan jumlah penduduk dapat menimbulkan munculnya kawasan permukiman kumuh, yang kerap dianggap sebagai salah satu permasalahan potensial dalam area perkotaan (Safrizal et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman kumuh memiliki permasalahan yang kompleks, karena dipengaruhi oleh beragam faktor fisik, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Setiap faktor tersebut memerlukan penanganan yang bersifat spesifik agar upaya perbaikan dan pembangunan kawasan permukiman kumuh dapat berjalan secara lebih efektif. (Suhaeni, 2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005–2025, permukiman kumuh menjadi prioritas nasional.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Makassar juga dihadapkan pada permasalahan permukiman kumuh yang cukup signifikan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 826/653.2/Tahun 2018 mengenai Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh, tercatat sebanyak 127 kelurahan telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh dengan total luas mencapai 650,74 hektar. Pemerintah melakukan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam mewujudkan target nasional 100-0-100. Program KOTAKU telah diterapkan di 271 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat (Wahyuni et al., 2023)

Program KOTAKU bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Liandri & Suheri, 2019). Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya secara mandiri (Marlina, 2024). Program KOTAKU menekankan pada peningkatan kualitas permukiman melalui

penyediaan dan perbaikan infrastruktur serta pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung Pembangunan permukiman perkotaan yang memenuhi standar hunian yang layak. (Ahmad Hadi et al., 2023)

Dampak yang diberikan oleh program KOTAKU telah berhasil menurunkan luasan kumuh di beberapa wilayah prioritas penanganan beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Evaluasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana program ini mampu menjawab permasalahan kekumuhan serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan. Kawasan sub-urban sebagai area peralihan menghadapi tantangan yang kompleks, terutama akibat laju pertumbuhan penduduk yang relatif pesat dan dinamika perkembangan kawasan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan sub-urban sebagai ruang yang strategis untuk dikaji lebih mendalam, guna memahami sejauh mana intervensi program pemerintah mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan nyata yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU di Kawasan sub-urban. Sehingga dapat diketahui kondisi infrastruktur setelah pelaksanaan program, efektivitas implementasi program, serta arahan penanganan yang sesuai. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perencanaan wilayah dan kota, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting dan bentuk partisipasi masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar?
3. Bagaimana arahan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting dan bentuk partisipasi Masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.
3. Merumuskan arahan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang tepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, khususnya dalam kajian penanganan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kawasan sub-urban. Penelitian ini juga berupaya memperkaya literatur akademik mengenai evaluasi program penataan kawasan kumuh yang tidak hanya meninjau aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan program perumahan dan permukiman, serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah perkotaan dan sub-urban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi eksisting permukiman dan efektivitas pelaksanaan Program KOTAKU di kawasan sub-urban Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Biringkanaya (Kelurahan Bakung), Panakkukang (Kelurahan Panaikang dan Pandang), serta Tamalanrea (Kelurahan Bira, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, dan Tamalanrea Jaya). Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh agar lebih tepat sasaran. Hasil penelitian juga diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hasil program, sehingga keberlanjutan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dapat terus terjaga.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah terkait dengan batasan wilayah studi yang akan diteliti, sedangkan ruang lingkup substansi berkaitan dengan materi yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini berada di kawasan sub-urban Kota Makassar, yang meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Biringkanaya (Kelurahan Bakung), Kecamatan Panakkukang (Kelurahan Panaikang dan Pandang), serta Kecamatan Tamalanrea (Kelurahan Bira, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, dan Tamalanrea Jaya). Wilayah-wilayah tersebut dipilih karena termasuk wilayah dengan kawasan permukiman kumuh yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Fokus wilayah

penelitian dibatasi pada kawasan permukiman yang telah mendapatkan intervensi program, sehingga hasil analisis lebih terarah pada evaluasi pelaksanaan program di lokasi yang relevan.

2. Ruang Lingkup Substansi

Substansi pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi kondisi eksisting dan bentuk pelaksanaan Program KOTAKU di kawasan sub-urban Kota Makassar, khususnya di wilayah penelitian.
- b. Analisis efektivitas pelaksanaan Program KOTAKU, meliputi pencapaian indikator penanganan kumuh (jalan lingkungan, drainase, air bersih, limbah, persampahan, proteksi kebakaran) serta partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program.
- c. Penyusunan arahan dalam penanganan kualitas permukiman kumuh berbasis hasil evaluasi pelaksanaan program, sehingga dapat mendukung keberlanjutan penataan kawasan di Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dari penelitian ini terdiri atas lima bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan. Disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian baik wilayah maupun substansi. Bab ini juga memuat tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka konsep penelitian yang menjadi landasan analisis.

BAB II Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, serta populasi dan sampel penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang diterapkan, variabel penelitian, serta kerangka penelitian yang menggambarkan alur penelitian secara sistematis.

BAB III Hasil

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang disajikan merupakan kondisi aktual berdasarkan hasil observasi, wawancara, kuesioner, maupun studi dokumen yang telah dilakukan.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi, kondisi fisik di lokasi penelitian. Kemudian memaparkan mengenai analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya sesuai dengan tinjauan pustaka dan menggunakan teknik analisis yang telah dirancang

BAB V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang memuat kesimpulan

sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan hasil-hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini juga menyajikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program KOTAKU dalam penataan permukiman kumuh di Kota Makassar. Tidak hanya itu, bab ini juga menguraikan keterbatasan penelitian yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Kajian Teori

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa teori yang akan dikaji sesuai dengan variabel tujuan penelitian tersebut.

1.7.1 Pengertian Evaluasi

Secara etimologis, evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang berakar dari kata *value*, yang berarti nilai. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mencapai tujuannya serta memberikan dampak yang diharapkan terhadap masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan hasil pelaksanaan suatu program, tetapi juga sebagai sarana refleksi, akuntabilitas, serta sumber umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang (Komariyah, 2023). Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menilai manfaat, nilai, dan pencapaian suatu kebijakan atau program dengan melihat substansi, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga menghasilkan informasi yang objektif dan valid untuk perbaikan kebijakan. (Alfikri et al., 2025)

Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi program merupakan suatu upaya sistematis untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan atau tindak lanjut suatu program. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai serta untuk menentukan nilai, efektivitas, dan kesesuaian program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi tersebut dilaksanakan melalui perbandingan antara hasil pelaksanaan program dengan standar atau indikator yang telah dibakukan, sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan terukur.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dengan membandingkan antara tujuan yang direncanakan dan hasil yang dicapai. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait efektivitas pelaksanaan suatu program. Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu berdasarkan standar atau kriteria tertentu secara objektif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menentukan nilai, kualitas, serta arah perbaikan dari kegiatan yang dievaluasi.

1.7.2 Manfaat Evaluasi

Manfaat diadakannya evaluasi dikemukakan oleh Sudjana (2006) dalam Widyoko (2010) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan dilaksanakan dan seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya,
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari suatu program,
3. Untuk memahami akuntabilitas publik untuk pemerintah bertanggung jawab kepada publik yang pemilik dana dan penerima manfaat dari kebijakan dan program yang diimplementasikan.
4. Stakeholders dapat melihat dengan jelas manfaat dari sebuah kebijakan dan program yang diimplementasikan,
5. Untuk memberikan masukan yang berguna dari hasil evaluasi dalam pengambilan kebijakan di masa depan, sehingga kesalahan yang sama tidak

1.7.3 Model Pelaksanaan Evaluasi

Para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi yang dijelaskan dalam (Komariyah, 2023) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Model *Context, Input, Process, Product* (CIPP)

Model ini dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (1971) yang menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dari konteks, masukan, proses, hingga hasil.

- a. *Context Evaluation* menilai kebutuhan, masalah, dan peluang untuk menentukan tujuan program.
- b. *Input Evaluation* menilai strategi, rencana, dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- c. *Process Evaluation* menilai implementasi program dan mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan.
- d. *Product Evaluation* menilai hasil atau dampak program, baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

2. Model Berorientasi Tujuan (*Goal-Oriented*)

Model ini diperkenalkan oleh Ralph W. Tyler (1949) yang menekankan bahwa evaluasi harus mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal-Free Evaluation*)

Diperkenalkan oleh Michael Scriven (1972), model ini tidak berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melainkan pada hasil aktual yang muncul dari pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk menemukan efek-efek yang tidak terduga, baik positif maupun negatif.

4. Model Evaluasi Responsif (*Responsive Evaluation*)

Model ini dikembangkan oleh Robert Stake (1975) yang menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan, pandangan, dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat

dalam program. Evaluasi ini bersifat kontekstual dan berfokus pada bagaimana program dirasakan dan dipahami oleh peserta atau masyarakat.

5. Model Evaluasi Berfokus pada Pemanfaatan (*Utilization-Focused Evaluation*)

Dikembangkan oleh Michael Quinn Patton (1978), model ini menekankan bahwa hasil evaluasi harus dapat digunakan secara langsung oleh pengambil keputusan. Fokus utama model ini adalah bagaimana hasil evaluasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan dan pengambilan kebijakan program.

6. Model Evaluasi Sumatif dan Formatif. Model evaluasi formatif adalah model evaluasi internal yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang dijalankan (*in-progres*) dengan menilai ketercapaian rencana dan berfungsinya semua komponen sesuai tugasnya, jika terdapat hambatan maka perlu dilakukan revisi atau modifikasi. Model evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir program yang dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diamanatkan, memperoleh informasi mengenai keberhasilan.

1.7.4 Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003) dalam (Purwoko, 2025) meliputi beberapa aspek penting yang digunakan sebagai indikator dalam berbagai penelitian kebijakan. Kriteria tersebut antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks evaluasi, efektivitas digunakan untuk menilai apakah hasil atau dampak yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan sasaran program. Suatu program dikatakan efektif apabila seluruh kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang nyata terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan.

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Kriteria ini menilai sejauh mana upaya atau usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu program dapat memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi tidak hanya berbicara tentang pencapaian hasil, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dilakukan secara ekonomis, cepat, dan tidak boros. Dunn (2003) menjelaskan bahwa suatu program dikatakan efisien apabila penggunaan biaya, waktu, dan tenaga sebanding dengan hasil yang diperoleh atau bahkan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada input yang digunakan.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan serta tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ini menilai apakah hasil program sudah cukup dalam mengatasi masalah yang menjadi sasaran kebijakan. Meskipun suatu kebijakan bisa efektif dan efisien, namun

belum tentu cukup apabila hasilnya belum mampu memecahkan masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Perataan (*Equity*)

Perataan merupakan kriteria yang menilai sejauh mana manfaat dan dampak dari suatu kebijakan didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran. Dalam praktiknya, kebijakan publik yang baik harus mampu memberikan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan atau kurang berdaya.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berhubungan dengan kemampuan kebijakan atau program dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kriteria ini menilai sejauh mana pelaksanaan program dapat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi sosial serta memperhatikan masukan dari masyarakat. Suatu program yang responsif mampu memberikan ruang partisipasi dan umpan balik, serta menunjukkan fleksibilitas dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan efektif.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mengacu pada relevansi dan kegunaan hasil suatu program terhadap tujuan dan kebutuhan masyarakat. Suatu kebijakan dikatakan tepat apabila hasilnya tidak hanya bermanfaat, tetapi juga adil dan relevan bagi masyarakat. Ketepatan menjadi tolok ukur terakhir yang memastikan bahwa kebijakan publik memberikan dampak yang positif, layak, dan berkelanjutan terhadap kelompok sasaran.

1.7.5 Pengertian Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. World Bank (1999) menyebutkan bahwa permukiman kumuh termasuk bagian dari lingkungan perkotaan yang kurang diperhatikan, dengan kondisi hidup warganya yang sangat memprihatinkan. Hal ini tercermin dari hunian yang tidak layak, kepadatan penduduk yang tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial-budaya bagi masyarakat.

Menurut UN-HABITAT (2007), permukiman kumuh dapat diartikan sebagai kawasan yang ditandai oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya. Kawasan ini juga memiliki kualitas bangunan tempat tinggal yang rendah, tingkat kepadatan hunian yang tinggi, serta kondisi kepemilikan lahan atau tempat tinggal yang tidak terjamin keamanannya.

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar

kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat (Wardana & Kustiwan, 2009)

Menurut Yudhohusodo dalam Silalahi (2017), permukiman kumuh adalah kawasan hunian yang berkembang tanpa perencanaan yang matang, dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga sangat rendah. Kawasan ini ditandai dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi, kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun teknis, serta pola pemukiman yang tidak teratur. Kawasan ini juga mengalami kekurangan prasarana, utilitas, dan fasilitas sosial lainnya.

1.7.6 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut UN-HABITAT (2007), suatu kawasan dapat dikategorikan sebagai permukiman kumuh (*slum*) apabila memiliki satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut:

- a) Kualitas bangunan tidak layak huni, yaitu rumah dibangun dengan bahan yang tidak permanen atau tidak memenuhi standar keselamatan serta ketahanan terhadap kondisi lingkungan.
- b) Kepadatan hunian tinggi, di mana jumlah penghuni dalam satu rumah terlalu banyak atau luas ruang per orang terlalu kecil sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko kesehatan.
- c) Kurangnya akses terhadap air bersih, yaitu penduduk tidak memiliki sumber air layak untuk kebutuhan sehari-hari, baik dari segi kualitas, jarak, maupun ketersediaan.
- d) Kurangnya akses terhadap sanitasi yang memadai, yaitu tidak tersedia sistem pembuangan limbah atau fasilitas jamban yang sehat dan aman.
- e) Status kepemilikan lahan tidak aman, di mana penghuni tidak memiliki jaminan hukum atas tempat tinggalnya, seperti kepemilikan yang sah atau perlindungan dari penggusuran

1.7.7 Dampak Terjadinya Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh memberikan pengaruh yang luas terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Menurut UN-Habitat (2016), permukiman kumuh umumnya dicirikan oleh keterbatasan prasarana dasar, kepadatan yang tinggi, akses sanitasi yang buruk, serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan secara fisik maupun sosial. Pencemaran lingkungan fisik seperti menumpuknya sampah, buruknya kualitas air, dan sistem drainase yang tidak berfungsi berpotensi menurunkan kenyamanan dan kelayakan lingkungan hunian.

Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. WHO (2018) mencatat bahwa permukiman dengan sistem sanitasi tidak memadai memiliki tingkat kejadian penyakit seperti diare, infeksi kulit, demam tifoid, serta penyakit yang ditularkan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tingginya kepadatan penduduk di kawasan kumuh, yang menyebabkan penyakit lebih mudah menyebar dari satu individu ke individu lainnya.

Selain dampak fisik dan kesehatan, kondisi permukiman kumuh juga mempengaruhi aspek psikologis dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian psikologi lingkungan oleh Evans (2016) menjelaskan bahwa hidup dalam lingkungan yang padat, tidak teratur, dan minim ruang terbuka dapat menimbulkan stres jangka panjang, rasa tidak aman, serta penurunan motivasi.

1.7.8 Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui program pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 97 Ayat (1). Ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemugaran merupakan kegiatan memperbaiki maupun membangun kembali kawasan permukiman yang tidak layak huni sehingga menjadi lingkungan yang memenuhi standar kelayakan.
2. Peremajaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas permukiman agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Peremajaan biasanya diawali dengan penyediaan hunian pengganti yang layak agar penduduk tidak dirugikan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan menyiapkan tempat tinggal sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat dan menjamin keamanan serta ketertiban bagi seluruh penduduk.
3. Permukiman kembali adalah proses relokasi masyarakat dari kawasan tidak layak huni menuju lokasi yang lebih layak. Tanggung jawab pelaksanaan pemukiman kembali berada pada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dengan tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan panduan *Community Organization Development Institute (CODI)* melalui program *Baan Mankong Urban* (2019) dalam Shelby (2021), terdapat lima strategi penanganan permukiman kumuh yang dinilai efektif yaitu sebagai berikut:

1. On-site Upgrading

On-site Upgrading dilakukan dengan memperbaiki layanan dasar dan kondisi fisik lingkungan tanpa memindahkan masyarakat. Struktur sosial, pola permukiman, serta karakter lingkungan tetap dipertahankan.

2. Reblocking

Reblocking adalah upaya menata ulang kawasan yang tidak teratur menjadi lebih terstruktur sesuai blok permukiman. Penataan dilakukan dengan membangun jaringan jalan utama, jalan lingkungan, drainase, listrik, dan penyediaan air bersih. Proses ini memerlukan renovasi atau pembangunan ulang sebagian rumah demi

mewujudkan permukiman yang menyatu dan tertata rapi. Persetujuan masyarakat penting, terutama karena adanya proses pembebasan lahan dan penyediaan dana pembangunan. Salah satu bentuk lain dari upaya penataan dalam reblocking adalah konsolidasi lahan, yaitu kegiatan menata kembali kawasan tidak teratur secara terpadu untuk optimalisasi penggunaan lahan dengan dukungan swadaya masyarakat.

3. *Land Sharing*

Land sharing dilakukan dengan memberikan kembali lahan kepada warga yang memiliki status kepemilikan sah, dengan luasan yang mendekati hak awal mereka. Perencanaan penataan ulang tetap mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana umum. Penanganan melalui skema ini dapat diterapkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Tingkat kepemilikan lahan secara sah cukup tinggi, meski luasannya terbatas
- b. Tingkat kekumuhan tinggi dan terdapat ruang yang cukup untuk menempatkan prasarana dasar
- c. Pola bangunan tidak teratur dan sulit diatur kembali tanpa intervensi.

4. *Reconstruction*

Reconstruction adalah upaya membangun ulang permukiman secara total dengan menghancurkan kawasan tidak teratur lalu membangunnya kembali mengikuti standar teknis. Proses ini memerlukan persetujuan masyarakat dan kepastian pendanaan. Setelah pembangunan selesai, permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

- a. Keunggulan pembangunan rumah susun antara lain: Semua penduduk dapat tetap tinggal di lokasi tersebut;
- b. Harga tanah di pusat kota sangat tinggi sehingga penggunaan vertikal lebih efisien;
- c. Sebagian lahan dapat dipakai untuk fasilitas sosial;
- d. Sebagian lainnya dapat dijual kepada pihak swasta atau pemerintah untuk mengurangi biaya pembangunan, sehingga harga sewa atau cicilan lebih terjangkau;
- e. Pemerintah memperoleh sebagian lahan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung lain.

Sistem rumah susun mengurangi luas lahan terbangun per unit rumah, tetapi meningkatkan luas bangunan secara vertikal. Ruang yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti area komersial, perkantoran, pusat hiburan, serta fasilitas lingkungan lainnya.

5. *Relocation*

Relokasi adalah pemindahan suatu komunitas secara menyeluruh ke lokasi yang lebih baik, tidak hanya dari sisi lingkungan fisik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Pada awalnya, relokasi sering bersifat non-sukarela karena dipengaruhi kepentingan investasi; namun, ketika dirancang dengan baik dan melibatkan masyarakat, relokasi dapat berubah menjadi pilihan sukarela karena menawarkan kehidupan yang lebih baik. Skema ini mencerminkan pemenuhan amanat

konstitusi bahwa hak atas tempat tinggal yang layak sama pentingnya dengan kepentingan pembangunan maupun investasi. Relokasi memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk terdampak, sesuatu yang belum tentu diperoleh dari proyek investasi, apalagi jika proyek tersebut berorientasi keuntungan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Program penanganan permukiman kumuh pada dasarnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pada setiap tahap penyelenggaraan. Setiap proses pengambilan keputusan selalu melibatkan warga melalui forum musyawarah maupun rembuk bersama yang difasilitasi pemerintah. Menurut Kholqi (2020), penyelenggaraan program ini berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap awal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, peran, dan kontribusi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan agar tercipta kolaborasi yang efektif dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Pada tahap ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti lokakarya
- b. Membentuk kelompok masyarakat yang aktif untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal pada permukiman tersebut.

2. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini masyarakat mulai merumuskan aspirasi dan kebutuhan mereka berdasarkan kondisi eksisting permukiman. Hasil perumusan tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan pembangunan lingkungan permukiman yang layak huni.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur diimplementasikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Seluruh proses pelaksanaan harus berjalan secara transparan dan akuntabel, serta berfokus pada kegiatan prioritas penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Tahap Evaluasi/Keberlanjutan

Evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan melalui upaya perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tanpa adanya pemeliharaan secara berkala, infrastruktur maupun sarana yang telah dibangun akan mudah rusak dan tidak berfungsi optimal.

1.7.9 Tinjauan Umum Program Kotaku

Program KOTAKU merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari implementasi *Gerakan 100-0-100*, yaitu 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (Dirjen Cipta Karya

Kementerian PUPR, 2020). Melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, fokus pelaksanaan mencakup penguatan sistem, pemberian dukungan kepada pemerintah daerah, serta fasilitasi peran masyarakat dalam proses penataan permukiman. Untuk mencapai tujuan tersebut, Program KOTAKU membangun suatu platform kolaboratif yang mengoptimalkan kontribusi pemerintah daerah dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.

Target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang dijalankan Ditjen Cipta Karya menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kota/kabupaten, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama RPJMN tersebut adalah memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat, dilengkapi dengan sarana prasarana dasar serta sistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Sejak 2020, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah memulai berbagai upaya penanganan permukiman kumuh yang ditargetkan selesai pada 2024. Tujuan pelaksanaan perencanaan Program KOTAKU meliputi:

1. Mengurangi luas kawasan permukiman kumuh sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik.
2. Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota sebagai lembaga yang berfungsi menangani isu perumahan dan permukiman secara lebih efektif.
3. Menyusun rencana penanganan permukiman kumuh pada level pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pada level komunitas melalui rencana penanganan tingkat masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan kegiatan dan infrastruktur yang mendorong perbaikan kualitas kawasan.
5. Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, melalui kesepakatan dan penerapan aturan bersama di tingkat komunitas.

Secara umum, pencapaian tujuan Program KOTAKU diukur menggunakan indikator *outcome* berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan di kawasan kumuh sesuai kriteria yang ditentukan, seperti drainase lingkungan, pengelolaan air bersih/minum, persampahan, air limbah, dan perlindungan kebakaran.
2. Menurunnya luas kawasan kumuh sebagai dampak dari membaiknya layanan dan infrastruktur dasar.
3. Terbentuk dan berfungsinya Pokja PKP sebagai kelembagaan utama dalam mendukung implementasi program di tingkat kota/kabupaten.

4. Tingkat kepuasan penerima manfaat meningkat terhadap kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang telah dibangun di kawasan kumuh.

Pelaksanaan Program KOTAKU berpedoman pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebagai pengarah utama

Pemerintah daerah berperan sebagai pemimpin dalam pengelolaan penanganan kawasan kumuh secara kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, perangkat pemerintahan, masyarakat, serta kelompok peduli lainnya. Mereka menjadi pihak yang mengoordinasikan arah, strategi, dan langkah penanganan secara terpadu.

2. Perencanaan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil (*outcome*)

Proses penataan permukiman dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan menitikberatkan pada pencapaian tujuan akhir. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan permukiman layak huni sesuai visi pembangunan kabupaten/kota, sekaligus mendukung target nasional berupa pencapaian 0 hektare kawasan kumuh dalam lima tahun.

3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Perencanaan penanganan kawasan kumuh disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta diselaraskan dengan sistem perencanaan kota/kabupaten. Seluruh proses pelaksanaan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Pada tingkat masyarakat, perencanaan lokal diakomodasi terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke dalam anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Berbasis partisipasi masyarakat

Prinsip partisipatif diwujudkan melalui perpaduan antara pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Rencana yang disusun di tingkat masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pada tingkat kota/kabupaten, sehingga kebutuhan lokal benar-benar terwakili dalam perencanaan makro.

5. Mendorong kreativitas dan inovasi

Penanganan kawasan kumuh menuntut adanya kemampuan untuk menghadirkan solusi baru dan pendekatan yang lebih efektif. Kreativitas dan inovasi menjadi prinsip penting dalam menjawab berbagai permasalahan sekaligus membuka peluang perbaikan, guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak huni dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

6. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat diharapkan mampu mengelola pembangunan wilayahnya secara

mandiri dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta inklusivitas.

7. Investasi penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan

Investasi yang dilakukan dalam penanganan kawasan kumuh tidak hanya diarahkan untuk mendukung perkembangan kota, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas lingkungan serta daya dukungnya. Maka intervensi yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kualitas lingkungan di masa mendatang.

Dasar hukum pelaksanaan Program KOTAKU yang akan disusun berdasarkan Landasan Konstitusional UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, regulasi tersebut mencakup:

1. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 : "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan";
2. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penanganan Permukiman Kumuh Wajib Dilakukan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Setiap Orang;
3. UU Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

1.7.10 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dijelaskan oleh Meilinawati (2018) dalam Trisnawati (2023), sebagai proses ikut sertanya individu maupun kelompok secara sadar dan bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini mencakup seluruh tahapan penting, mulai dari fase persiapan, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program.

Isbandi (2007) dalam Andreeyan (2004) juga mengemukakan bahwa partisipasi dapat dilihat sebagai keterlibatan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dalam konteks ini, masyarakat dilibatkan dalam proses mengenali potensi serta permasalahan yang mereka hadapi, mempertimbangkan dan memilih alternatif penyelesaian yang paling sesuai, melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengatasi persoalan tersebut, serta berperan dalam menilai perubahan atau dampak yang muncul setelah program dijalankan.

Selain definisi tersebut, bentuk-bentuk partisipasi yang tampak nyata di masyarakat dapat diuraikan berdasarkan kategorisasi dari Cohen & Uphoff (1980) dalam Salam (2010) yang membaginya menjadi empat jenis utama:

1. *Participation in decision making*

Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui penyampaian ide, saran, dan evaluasi terhadap program atau kebijakan, masyarakat ikut menentukan pilihan serta mencapai kesepakatan terkait isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

2. *Participation in implementation*

Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan mencerminkan bagaimana masyarakat mengambil peran langsung dalam proses pembangunan. Peran tersebut dapat berupa kontribusi tenaga, dana, maupun barang sebagai dukungan nyata terhadap pelaksanaan program atau proyek di wilayah mereka.

3. *Participation in benefit*

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat berkaitan dengan penerimaan manfaat dari program pembangunan. Mereka berhak memperoleh hasil positif sebagai timbal balik dari keterlibatan mereka. Besarnya manfaat yang dirasakan biasanya dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

4. *Participation in evaluation*

Partisipasi pada tahap evaluasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengamati jalannya pelaksanaan program. Masyarakat dapat memberikan koreksi, masukan, atau kritik untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan telah sesuai rencana serta menghasilkan dampak yang diharapkan. Evaluasi ini menjadi cara untuk melihat sejauh mana pembangunan berjalan sesuai tujuan awal.

1.7.11 Faktor Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat

Menurut Amalia (2017), terdapat sejumlah faktor yang dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam sebuah program ataupun kebijakan. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Usia

Tingkat usia seseorang dapat memengaruhi cara pandangya terhadap kegiatan sosial maupun pembangunan di lingkungannya. Perbedaan usia sering kali menentukan tingkat kepedulian, energi, maupun kesiapan individu untuk terlibat dalam aktivitas masyarakat.

2. Jenis Kelamin

Dalam beberapa kondisi, masih terdapat anggapan bahwa urusan pembangunan adalah domain laki-laki. Persepsi tersebut membuat sebagian perempuan merasa kurang berwenang atau kurang memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.

3. Pendidikan

Pendidikan sering dianggap sebagai faktor dasar yang menentukan tingkat partisipasi. Latar belakang pendidikan dapat membentuk pola pikir, pemahaman, serta sikap seseorang terhadap lingkungan dan proses pembangunan, sehingga berpengaruh pada keinginannya untuk terlibat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan dapat memengaruhi ketersediaan waktu serta tingkat prioritas seseorang dalam mengikuti kegiatan masyarakat. Individu dengan pekerjaan tertentu mungkin memiliki waktu lebih terbatas atau justru lebih leluasa untuk berpartisipasi, tergantung pada tuntutan pekerjaan tersebut.

5. Lama Waktu Tinggal

Durasi tinggal seseorang di suatu wilayah serta pengalaman berinteraksinya dengan lingkungan sekitar sering kali memengaruhi tingkat keterlibatan. Semakin lama seseorang tinggal, semakin besar rasa memiliki dan kepeduliannya, sehingga partisipasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk yang baru menetap.

1.7.12 Pengertian Kawasan Sub-Urban

Kawasan sub-urban merupakan wilayah yang berada di bagian pinggiran kota dan berperan sebagai zona peralihan antara area urban yang padat dan kawasan pedesaan. Kawasan sub-urban secara umum dipahami sebagai wilayah peralihan antara pusat kota dan kawasan pedesaan yang berkembang akibat meluasnya aktivitas perkotaan. Yunus (2000) dalam Mulyadi (2017), mendefinisikan kawasan sub-urban sebagai *transition zone* yang berada di antara wilayah urban dan rural, ditandai dengan campuran penggunaan lahan, mobilitas penduduk tinggi, serta meningkatnya fungsi permukiman sebagai akibat tekanan pertumbuhan kota. Dalam konteks penggunaan lahan, kawasan ini sering kali memiliki pemisahan fungsi antara hunian, komersial, dan fasilitas publik, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakatnya sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas ke pusat kota maupun fasilitas lainnya.

Pola perkembangan kawasan sub-urban sangat dipengaruhi oleh perkembangan perumahan yang masif, meningkatnya kebutuhan ruang tinggal, serta preferensi masyarakat terhadap lingkungan yang lebih tenang dan minim kepadatan. Ketergantungan pada kendaraan pribadi sering menjadi karakter dominan, karena pemisahan fungsi ruang menyebabkan jarak antara permukiman dan fasilitas publik menjadi relatif jauh. Kawasan sub-urban tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai cerminan pola hidup, struktur sosial, dan dinamika mobilitas masyarakat yang berada di luar pusat kota.

Menurut Amri dan Manaf (2025), kawasan sub-urban berkembang sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk kota dan kebutuhan akan ruang tinggal baru, sehingga wilayah ini kerap ditandai oleh penyebaran permukiman baru, meningkatnya aksesibilitas, serta munculnya fungsi ekonomi pendukung. Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, kawasan sub-urban dapat disimpulkan sebagai area yang berada di pinggiran kota, mengalami perkembangan akibat ekspansi perkotaan, serta memiliki sifat campuran antara karakter perkotaan dan pedesaan. Wilayah ini berfungsi sebagai zona transisi yang terus berkembang seiring perubahan kebutuhan ruang kota dan dinamika mobilitas masyarakat.

1.8 Penelitian Terdahulu

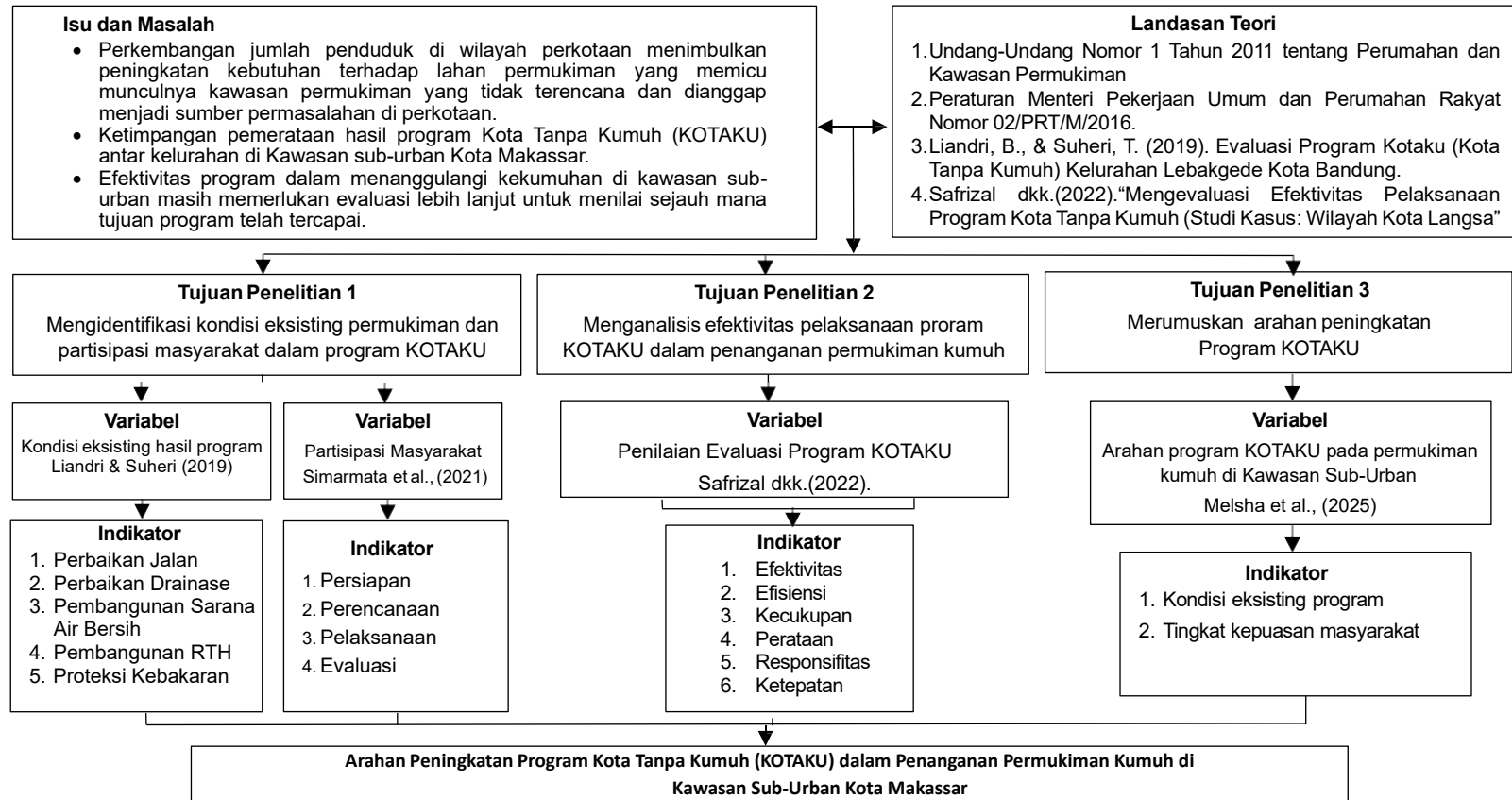
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
1	Nadila Salsabila Melsha, Rindang Alfiah, Sri Sukmawati	Kekumuhan Perkotaan dalam Perspektif Fisik, Sosial, dan Ekonomi: Studi Kasus di Kelurahan Kebon Melati, Jakarta	Menilai tingkat kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Kebon Melati berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta mengetahui perubahan kualitas permukiman setelah adanya Program KOTAKU	1. Fisik (kondisi bangunan, kepadatan, keteraturan, sarana-prasarana, drainase, air bersih, persampahan, proteksi kebakaran). 2. Sosial (pendidikan, interaksi sosial, kelompok sosial, kependudukan). 3. Ekonomi (pendapatan, pekerjaan, nilai strategis lokasi). 4. Kualitas hidup (kenyamanan, kepuasan, kebahagiaan)	Pendekatan <i>mixed method</i> dengan analisis deskriptif dan <i>scoring</i> berdasarkan indikator yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2018. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, serta dokumen resmi. Responden ditentukan dengan metode <i>purposive sampling</i>	Persamaan: Meneliti program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh Perbedaan: Lokasi penelitian dan variabel yang diteliti	Terjadi perubahan kualitas permukiman di Kelurahan Kebon Melati setelah program KOTAKU: RW 12 mengalami peningkatan (dari kumuh sedang menjadi ringan), RW 14 tetap kumuh sedang, RW 15 mengalami penurunan kualitas (dari kumuh ringan menjadi sedang).	<i>Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota</i> , 21(1), 130–154. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/50419
2	B. Liandri, T. Suheri	Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan	Mengevaluasi kondisi permukiman setelah pelaksanaan Program KOTAKU, menilai	1. Jalan lingkungan 2. Drainase lingkungan 3. Penyediaan air bersih 4. Pengolahan air limbah 5. Pengelolaan persampahan 6. Proteksi kebakaran	Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Persamaan: Mengevaluasi pelaksanaan program Kotaku dalam penataan permukiman kumuh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Lebakgede belum sepenuhnya efektif. Pengolahan limbah sebagian besar tidak	<i>Jurnal Wilayah dan Kota</i> , Vol. 06, No. 02, hlm. 78–86. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wiladex

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
		Coblong Kota Bandung	pencapaian indikator program, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil program			Perbedaan: Lokasi penelitian dan variabel yang diteliti	berjalan dengan baik, sedangkan pengelolaan persampahan dinilai masih lemah dan tidak tercapai di mayoritas RW.	yahkota/artic le/view/3192
3	Tri Wahyuni, Kusumastuti, Candraningrat Ekaputri Widodo	Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran	1. Kondisi masyarakat (partisipasi masyarakat, struktur kelembagaan, legalitas lahan, ketersediaan lahan, kebijakan, anggaran) 2. Tahapan keberlanjutan program (kerangka regulasi, kelembagaan, database, monitoring) 3. Kinerja KPP (pemeliharaan prasarana, pelaporan kualitas sarana prasarana, kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat)	Pendekatan kuantitatif dengan teknik scoring menggunakan skala Likert. Teknik sampling menggunakan purposive sampling kepada stakeholder terkait.	Persamaan: Mengevaluasi pelaksanaan program Kotaku dalam penataan permukiman kumuh Perbedaan: Metode yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif-scoring, sementara penelitian ini mengombinasikan evaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh	Jurnal Desa-Kota, Vol. 5, No. 2, hlm. 125-139. https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/72867/41813

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
						kualitatif dan kuantitatif.	sebesar 88,7% hingga tahun 2021.	
4	Fadhilah, Bakti Setiawan	Pengaruh Program KOTAKU terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Selumit Pantai	Mengidentifikasi capaian Program KOTAKU di Kelurahan Selumit Pantai serta menganalisis pengaruh dan faktor-faktor yang memengaruhi program tersebut dalam pengentasan kemiskinan	1. Infrastruktur dasar 2. Kualitas bangunan rumah 3. Aset masyarakat 4. Pendapatan 5. Pengeluaran 6. Faktor eksternal: partisipasi masyarakat, kesadaran sosial, peran ketua RT/RW, keterbatasan lahan, bencana kebakaran, tipologi wilayah	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif.	<u>Persamaan:</u> Menilai keberhasilan program Kotaku dari beberapa indikator (fisik, sosial, ekonomi). <u>Perbedaan:</u> Lokasi Penelitian dan sasaran penelitian yakni pengaruh KOTAKU terhadap pengentasan kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Program KOTAKU di Kelurahan Selumit Pantai memberikan capaian yang sangat baik.. Aspek yang paling tinggi adalah infrastruktur dasar (35,2%), disusul aset masyarakat (25,35%), kualitas bangunan rumah (15,5%), pengeluaran (12,67%), dan pendapatan (11,26%). Analisis menunjukkan bahwa program ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.	Jurnal Desa-Kota, Vol. 5, No. 2, hlm. 125-139. Universitas Sebelas Maret. DOI: 10.14710/TALOKA.24.2.84-100

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
5	Safrizal Safrizal, Safuridar Safuridar, Muhammad Fuad	Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa) (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas program KOTAKU di Kota Langsa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program ini.	1. Jalan lingkungan 2. Drainase lingkungan 3. Pengelolaan persampahan 4. Pengelolaan air limbah 5. Penyediaan air bersih/minum 6. Proteksi kebakaran 7. Ruang terbuka hijau 8. Partisipasi masyarakat	Pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, kuesioner, serta studi dokumen.	<u>Persamaan:</u> Melakukan evaluasi terhadap program Kotaku dan variabel yang digunakan <u>Perbedaan:</u> Metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian	Hasil analisis data menemukan bahwa program KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi pemukiman kumuh di Kota Langsa. Namun demikian, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program tersebut.	Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 12, Nomor 2, https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/3242

1.9 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

BAB II

METODE PENELITIAN

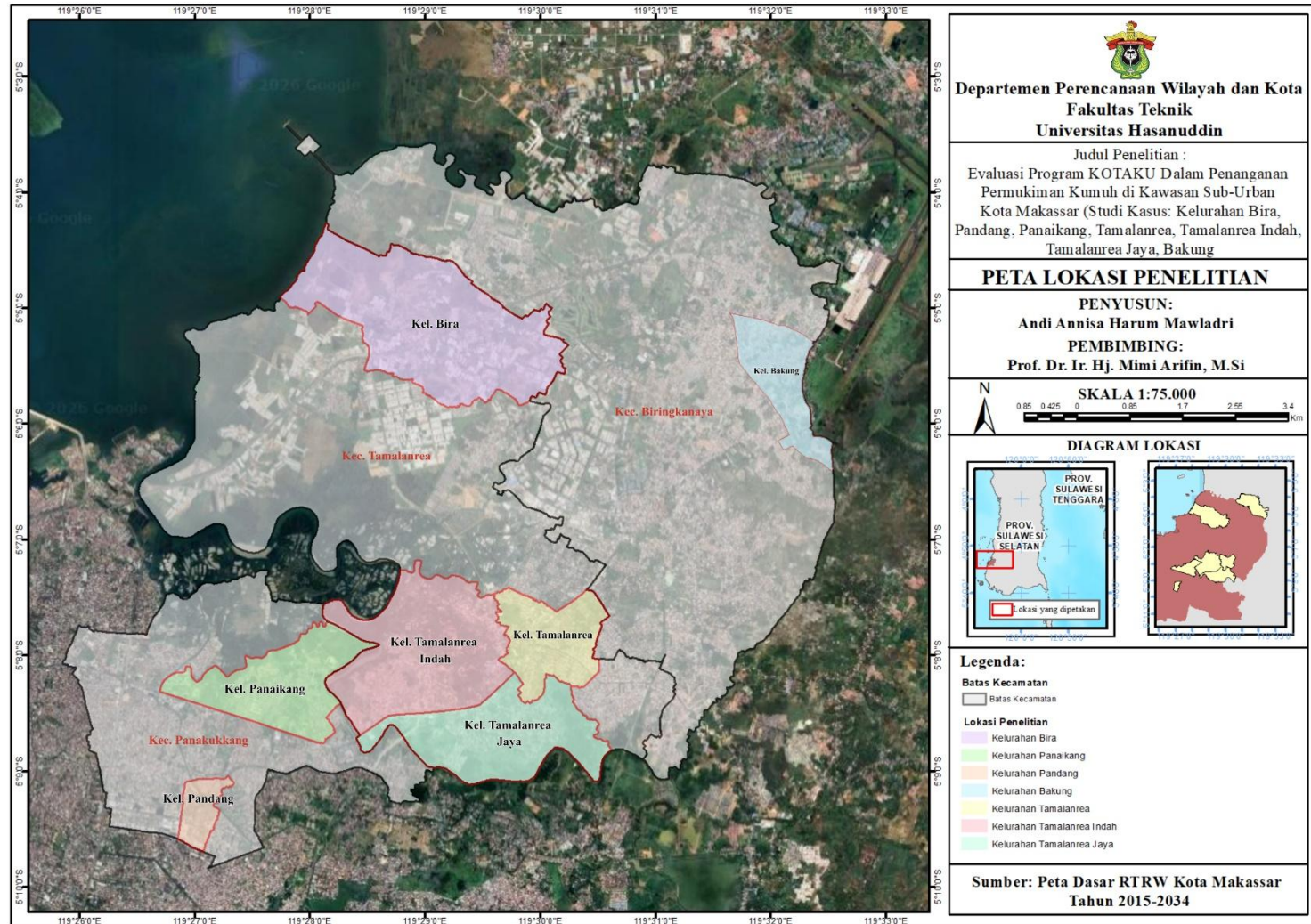
2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *mixed methods*, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji tidak hanya membutuhkan data berupa angka yang terukur, tetapi juga penjelasan mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan partisipasi masyarakat terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kawasan sub-urban Kota Makassar. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting program serta mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan Program KOTAKU melalui kuesioner berbasis skala penilaian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyusun arahan peningkatan Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, melalui pendalaman informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, serta analisis terhadap kondisi dan permasalahan di wilayah penelitian.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di 7 kelurahan yang tersebar pada 3 kecamatan di Kota Makassar, yaitu Kelurahan Bakung di Kecamatan Biringkanaya; Kelurahan Panaikang dan Pandang di Kecamatan Panakkukang; serta Kelurahan Bira, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, dan Tamalanrea Jaya di Kecamatan Tamalanrea. Lokasi-lokasi ini dipilih karena termasuk dalam wilayah pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan mewakili kawasan sub-urban dengan karakteristik sosial dan fisik yang beragam.

Pemilihan kelurahan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi eksisting permukiman kumuh, efektivitas pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, serta arah keberlanjutan program KOTAKU di masing-masing wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program. Waktu penelitian dijadwalkan berlangsung pada September–Desember 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis. Penentuan waktu tersebut disesuaikan dengan ketersediaan responden, kondisi lapangan, dan kelancaran proses penelitian.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: RTRW Kota Makassar 2015-2034, diolah oleh penulis (2025)

2.3 Populasi dan Sampel

2.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di 7 kelurahan lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Bakung di Kecamatan Biringkanaya; Kelurahan Panaikang dan Pandang di Kecamatan Panakkukang; serta Kelurahan Bira, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, dan Tamalanrea Jaya di Kecamatan Tamalanrea. Populasi ini dipilih karena wilayah tersebut merupakan lokasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Penelitian

No	Kelurahan	Populasi
1	Pandang	11.078
2	Panaikang	19.224
3	Bira	13.948
4	Tamalanrea	16.249
5	Tamalanrea Jaya	16.185
6	Tamalanrea Indah	13.147
7	Bakung	16.775
Total		106.606

Sumber: BPS Kota Makassar, 2025

2.3.2 Sampel

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus Isaac dan Michael, yang bertujuan untuk memperoleh ukuran sampel yang representatif berdasarkan jumlah populasi serta tingkat kesalahan yang ditetapkan. Pada penelitian ini digunakan tingkat kesalahan (*taraf signifikansi*) sebesar 10% ($d = 0,10$), agar hasil penelitian memiliki tingkat ketelitian yang tinggi namun tetap realistis untuk dilakukan di lapangan.

Total penduduk yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat di tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Bakung, Panaikang, Pandang, Bira, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, dan Tamalanrea Jaya, dengan jumlah total populasi sebanyak 106.606 jiwa (BPS Kota Makassar, 2025).

Rumus penentuan jumlah sampel menurut Isaac dan Michael adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S : jumlah sampel

λ^2 : Nilai Chi square pada $df=1$ dan $\alpha = 5\%$

N : jumlah populasi

P : Peluang benar

Q : Peluang salah

D : Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi perbedaan bias 0,001; 0,005; dan 0,1

Penentuan jumlah sampel dari populasi dalam penelitian dengan taraf kesalahan 10% dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$S = \frac{(1,96)^2 \times 106.606 \times 0,5 \times 0,5}{(0,1)^2 \times (106.606 - 1) + (1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$S = \frac{3,841 \times 106.606 \times 0,25}{0,01 \times 106.605 + 0,96025}$$

$$S = \frac{102.367}{1.067}$$

$$S = 95,94$$

Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 96 responden.

Pembagian jumlah responden pada masing-masing kelurahan dilakukan secara proporsional berdasarkan besar populasi di setiap kelurahan terhadap total populasi penelitian. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n_i = \frac{n_i}{N} \times n$$

Keterangan:

n_i = jumlah sampel di kelurahan ke-i

N_i = jumlah populasi di kelurahan ke-i

N = total populasi seluruh kelurahan

n = jumlah total sampel penelitian (96 orang)

Tabel 2. Jumlah Sampel Per Kelurahan Penelitian

No	Kelurahan	Populasi	Jumlah Sampel
1	Pandang	11.078	10
2	Panaikang	19.224	17
3	Bira	13.948	13
4	Tamalanrea	16.249	15
5	Tamalanrea Jaya	16.185	15
6	Tamalanrea Indah	13.147	12
7	Bakung	26.329	14
Total		116.160	96

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh total 96 responden yang akan disebar ke-7 kelurahan secara proporsional. Jumlah tersebut mewakili populasi setiap

wilayah dan sesuai dengan tingkat kesalahan 10% yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2013) merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih subjek berdasarkan tujuan atau kriteria spesifik yang sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan merasakan langsung dampak Program KOTAKU di wilayahnya. Sampel dalam penelitian ini meliputi masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Program KOTAKU, yaitu anggota BKM, anggota KSM, tenaga kerja lokal, lurah, ketua RT/RW, penerima manfaat program. Adapun kriteria responden penelitian adalah masyarakat yang telah menetap minimal 3 tahun di masing-masing kelurahan lokasi penelitian, mengetahui atau terlibat dalam program KOTAKU, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran lebih representatif mengenai efektivitas dan keberlanjutan program. Komposisi responden disesuaikan agar mewakili variasi perspektif, baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan, usia produktif maupun lanjut, serta tingkat keterlibatan yang berbeda dalam program.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

- a) Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik permukiman, fasilitas lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU di lapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi eksisting permukiman kumuh, partisipasi masyarakat, dan intervensi program di masing-masing kelurahan.
- b) Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui foto-foto atau sketsa lapangan yang menggambarkan kondisi fisik permukiman, kegiatan masyarakat, dan pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data observasi serta memberikan bukti visual terkait kondisi lapangan.
- c) Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan responden, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk menggali informasi kualitatif mengenai pengalaman, persepsi, dan partisipasi masyarakat terhadap program KOTAKU.
- d) Kuesioner merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tertulis berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, tingkat partisipasi, dan evaluasi efektivitas program KOTAKU. Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- a) Studi Literatur dan Pustaka merupakan pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik lain yang membahas evaluasi program KOTAKU, pengelolaan permukiman kumuh, atau kebijakan pembangunan perkotaan di kawasan sub-urban.
- b) Data Satelit merupakan data citra dari satelit yang digunakan untuk menganalisis tapak permukiman di lokasi studi kasus. Data ini membantu menilai kondisi fisik kawasan, distribusi bangunan, dan tata ruang permukiman sebelum dan setelah intervensi program.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan setiap tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, maka analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil mengenai pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kawasan sub-urban Kota Makassar.

1.5.1 Tujuan Penelitian Pertama

Tujuan penelitian pertama yaitu mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman dan bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Sub-Urban Kota Makassar. Analisis data untuk tujuan ini menggunakan analisis sebagai berikut:

- a) Analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik permukiman, sarana dan prasarana lingkungan, serta bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak, serta dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi eksisting permukiman dan partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di kawasan penelitian.
- b) Analisis Skoring merupakan metode yang digunakan untuk menilai dan mengidentifikasi tingkat kekumuhan permukiman pada setiap variabel yang telah ditetapkan, guna menentukan apakah kondisinya tergolong baik, sedang, atau buruk.
- c) Analisis Spasial digunakan untuk menyajikan ilustrasi berupa peta yang dilengkapi dengan *photo mapping* berdasarkan data yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Perangkat yang digunakan dalam analisis ini adalah ArcGIS versi 10.8.

1.5.2 Tujuan Penelitian Kedua

Tujuan penelitian kedua adalah menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program KOTAKU. Teknik analisis yang digunakan adalah *Importance-*

Performance Analysis (IPA). Metode IPA adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan strategi efektif berdasarkan tingkat kepentingan dan kepuasan suatu atribut. Metode IPA berguna untuk mengidentifikasi layanan yang perlu perbaikan untuk mempertahankan kepuasan masyarakat. Metode IPA dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU. Langkah penting dari implementasi IPA adalah memetakan atribut-atribut kepuasan dan kepentingan ke dalam diagram kartesius yang terdiri dari empat kuadran dan dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (x,y), dimana x merupakan rata-rata dari rata-rata skor penilaian kinerja, sedangkan y merupakan rata-rata dari skor kepentingan pengguna jasa. Pembagian kuadran pada analisis ini dilakukan berdasarkan nilai kinerja dan kepentingan. Rumus teknik analisis IPA yang digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian menurut Supranto (2011) dalam Kurniawan (2022) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai bobot dari variabel yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan skala likert untuk mengukur pendapat seseorang terhadap hal yang dikaji. Skala likert yang digunakan terdiri dari lima pilihan, yaitu:

Tabel 3. Skor Skala Likert Untuk Analisis IPA

Variabel	Kinerja/Kepuasan (Performance)	Variabel	Kepentingan/Harapan (Importance)
Skor	Keterangan	Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Puas	1	Sangat Tidak Penting
2	Tidak Puas	2	Tidak Penting
3	Cukup Puas	3	Cukup Penting
4	Puas	4	Penting
5	Sangat Puas	5	Sangat Penting

Sumber: Sugiyono, 2013

2. Menghitung tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan masyarakat terhadap Program KOTAKU dengan menggunakan rumus:

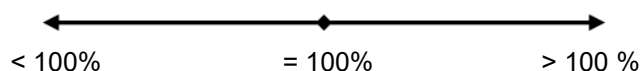
$$Tki \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Keterangan:

Tki = Tingkat kesesuaian

Xi = Skor penilaian kinerja/kepuasan masyarakat terhadap Program KOTAKU

Yi = Skor penilaian tingkat kepentingan masyarakat terhadap Program KOTAKU



Tki < 100 : berarti pelaksanaan Program KOTAKU belum memuaskan.

Tki = 100 : berarti pelaksanaan Program KOTAKU telah memuaskan.

Tki > 100 : berarti pelaksanaan Program KOTAKU sangat memuaskan.

3. Menghitung nilai rata-rata untuk setiap indikator tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum Xi}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum Yi}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Skor rata-rata kepuasan masyarakat terhadap Program Kotaku

$\bar{y}$ = Skor rata-rata kepentingan indikator pelaksanaan Program Kotaku

n = Jumlah responden

4. Membuat diagram kartesius dengan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) berdasarkan hasil nilai rata-rata antara kepuasan dan kepentingan masyarakat terhadap Program Kotaku. Diagram kartesius yaitu suatu ruang yang terbagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang saling tegak lurus pada titik (X,Y). Titik tersebut diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{k}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n Yi}{k}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Batas Sumbu X (Tingkat Kinerja)

$\bar{y}$ = Batas Sumbu Y (Tingkat Kepentingan)

k = Banyaknya indikator yang diteliti

5. Memasukkan hasil perhitungan ke dalam kuadran dengan titik x dan y dari perhitungan sebelumnya



Gambar 3. Diagram Kartesius Matriks *Importance Performance Analysis*

Sumber: Suminar, 2016

Penjabaran masing-masing kuadran pada Gambar 3 adalah sebagai berikut.

a. Prioritas utama

Pada kuadran ini terdapat indikator-indikator variabel yang dianggap penting dan setara akan tetapi kinerja dinilai belum memuaskan sehingga perlu adanya konsentrasi untuk meningkatkan performa yang masuk pada kuadran ini.

b. Pertahankan prestasi

Pada kuadran ini terdapat indikator-indikator variabel yang dianggap penting sehingga wajib untuk mempertahankan prestasi kinerja tersebut.

c. Prioritas rendah

Pada kuadran ini terdapat indikator-indikator variabel yang dianggap mempunyai tingkat persepsi atau tingkat aktual yang rendah atau tidak terlalu penting sehingga tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih terhadap indikator tersebut.

d. Berlebihan

Pada kuadran ini terdapat indikator-indikator variabel yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan sehingga lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada indikator tersebut kepada indikator lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi.

1.5.3 Tujuan Penelitian Ketiga

Tujuan penelitian ketiga adalah merumuskan arahan peningkatan Program KOTAKU dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni berdasarkan hasil analisis pada tujuan penelitian pertama dan kedua. Hasil penelitian pada tujuan pertama menunjukkan tingkat capaian kualitas infrastruktur dan kondisi permukiman, sedangkan tujuan kedua menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU. Oleh karena itu, penyusunan rekomendasi arahan dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator kelayakan permukiman serta strategi penguatan pelaksanaan program ke depan yang disesuaikan dengan persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat. Teknik analisis yang digunakan dalam merumuskan arahan peningkatan Program KOTAKU adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial.

Tabel 4. Variabel Penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
1	Mengidentifikasi kondisi eksisting program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.	Kondisi Eksisting Fisik Berdasarkan program KOTAKU	Hasil program KOTAKU yang dilaksanakan di wilayah.	Data sekunder: Dokumen KOTAKU kelurahan Data primer: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi	Analisis spasial & deskriptif kualitatif	Kondisi eksisting pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)
		Partisipasi Masyarakat	• Persiapan • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Bentuk partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
2	Menganalisis efektivitas pelaksanaan program dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.	Efektivitas Program	• Keberhasilan program dalam mengurangi kondisi kumuh. • Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. • Manfaat nyata hasil kegiatan fisik seperti perbaikan jalan, drainase, dan sanitasi.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
		Efisiensi Program	• Pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat program.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
			• Penggunaan dana program secara efektif. • Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan program. • Pemanfaatan tenaga kerja lokal.			masyarakat dalam program KOTAKU
		Kecukupan	• Kemampuan program menjawab kebutuhan dasar masyarakat terkait infrastruktur permukiman. • Kecukupan fasilitas yang dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat. • Kualitas sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
		Perataan	• Manfaat program dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. • Kesempatan yang sama bagi warga untuk terlibat dalam kegiatan program. • Pemerataan akses terhadap fasilitas hasil	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
			program di seluruh wilayah kelurahan.			
		Responsivitas	- Kinerja pelaksana dalam penanganan permukiman kumuh. - Tingkat pelibatan masyarakat dalam kegiatan program. - Perhatian pelaksana terhadap masukan dan saran dari masyarakat.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
		Ketepatan	- Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pelaksanaan. - Ketepatan jenis kegiatan program dengan kondisi dan potensi lokal. - Kesesuaian penerima manfaat dengan kriteria masyarakat yang membutuhkan.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU
		Keberlanjutan Program	- Perubahan kondisi fisik setelah program berjalan - Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan,	1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuesioner	<i>Analisis Important Performance Analysis</i>	Penilaian efektivitas program dan partisipasi masyarakat

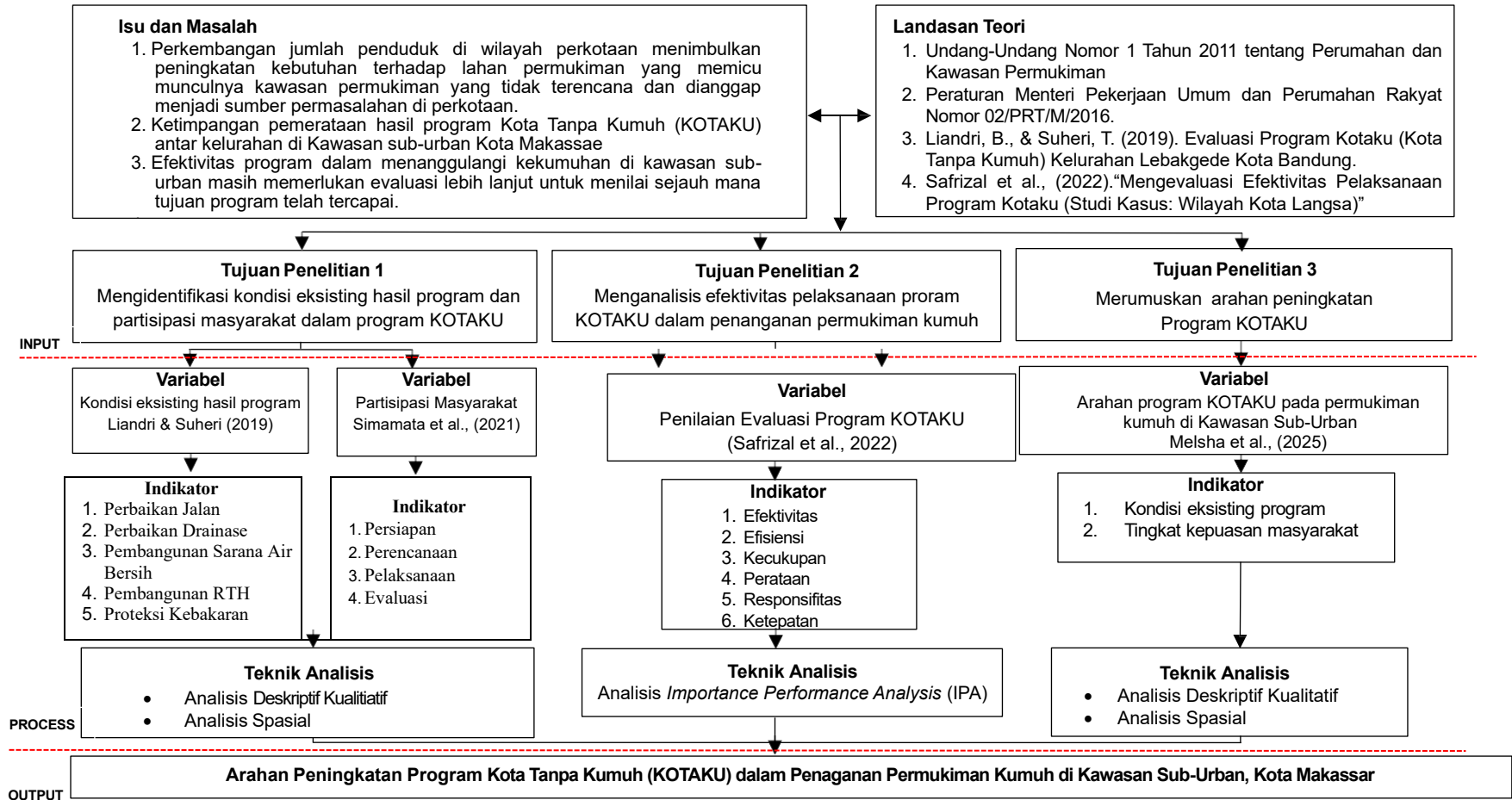
No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
			perawatan, dan pengawasan hasil program • Keberlanjutan program			dalam program KOTAKU
3	Merumuskan arahan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang tepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Sub-Urban, Kota Makassar.	Menyusun arahan program Kotaku	• Karakteristik/ Kondisi Eksisting Program • Penilaian Analisis IPA program Kotaku	Hasil penelitian 1 dan 2	Deskriptif kualitatif dan analisis spasial	Arahan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Batasan tersebut adalah:

1. Kondisi eksisting hasil Program KOTAKU diukur berdasarkan kondisi sarana dan prasarana permukiman yang telah dibangun atau diperbaiki melalui program tersebut di kawasan penelitian.
2. Kondisi fisik infrastruktur permukiman diukur melalui keberadaan dan kondisi fasilitas yang dibangun melalui Program KOTAKU, seperti perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan sarana air bersih, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), serta pembangunan atau perbaikan jembatan lingkungan.
3. Partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU diukur berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Penilaian evaluasi Program KOTAKU diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja program dalam menangani permukiman kumuh, yang mencakup beberapa indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program.
5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program KOTAKU diukur melalui penilaian masyarakat terhadap indikator yang telah ditentukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu sangat tidak puas (1), tidak puas (2), cukup puas (3), puas (4), dan sangat puas (5). Hasil penilaian tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan tingkat kepentingan masyarakat.
6. Arahan peningkatan Program KOTAKU diukur berdasarkan hasil analisis dari tujuan penelitian pertama dan kedua, yang mencakup analisis mengenai kondisi eksisting hasil pelaksanaan program serta prioritas utama dalam analisis IPA terhadap Program KOTAKU, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi peningkatan program dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan penelitian.

2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 4. Kerangka Penelitian
Sumber: Penulis, 2025